

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

Obyek dalam penelitian ini adalah anggota organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta, namun deskripsi yang akan peneliti jelaskan adalah gambaran secara umum. Hal tersebut dikarenakan anggota PWI cabang Yogyakarta tidak terpisah dari PWI pusat, namun merupakan anggota cabang PWI di daerah Yogyakarta.

#### **A. Sejarah Singkat PWI**

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terbentuk di gedung Sono Soeko (sekarang gedung Monumen Pers) Surakarta pada 9 Februari 1946, (Siregar, 2005:1). PWI berdiri sewaktu pasukan Inggris dan Belanda sedang meningkatkan operasi pendaratan dan pendudukan di berbagai daerah republik, serta terus meningkatkan strategi pengevangannya. “Wartawan-wartawan Republikan mengadakan kongres pertama untuk membentuk PWI, di mana pada pertemuan tersebut, selain wartawan dari daerah republik, juga hadir wartawan-wartawan yang berhasil lolos dari daerah-daerah pendudukan dan dari incaran serdadu Sekutu/Belanda,” (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013).

Para tokoh PWI berhasil melangsungkan tiga kali kongres selama masa perang kemerdekaan, sejak deklarasi kemerdekaan sampai saat berlangsungnya perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), yakni (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013):

Kongres pertama di Surakarta, 9-10 Februari 1946, menghasilkan pengurus yang diketuai Mr. Sumanang, diperkuat Sudarjo Tjokrosisworo, Sjamsuddin Sutan Makmur, B.M. Diah, Sumantoro, Ronggo Danukusumo, Djawoto dan Harsono Tjokroaminoto. Kongres kedua di kota Malang, 23-24 Februari 1947, menetapkan pengurus baru terdiri Usmar Ismail sebagai ketua, dibantu Djama! Ali, Sudarjo Tjokrosisworo, Sumanang, dan lain-lain. Usmar Ismail mengundurkan diri tidak lama kemudian, diganti Sumanang. Sumanang juga kemudian mundur, diganti Djawoto, waktu kepala kantor berita Antara pusat di Yogyakarta. Pada kongres ketiga di Yogyakarta, 7-9 Desember 1949, Djawoto terpilih kembali sebagai ketua, dibantu Djama! Ali, Darsjaf Rachman, Mashud dan lain-lain.

PWI bukanlah wadah persatuan pertama yang berdiri di Indonesia. Organisasi wartawan/pers yang pertama didirikan bagi kepentingan perjuangan dan profesi adalah Inlandsche Joernalisten Bond (IJB). IJB dibentuk pada tahun 1924 dengan dasar dan tujuan: “Melalui penyatuan semua wartawan pribumi di Indonesia berperan serta dalam kekuatan perjuangan demi kepentingan nasional dan mempertahankan wartawan.” IJB kemudian diubah menjadi Inlandsche & Chinesche Journalisten Bond dengan ketua Mohammad Joenoes dan sekretaris Parada Harahap. IJB pun merupakan organisasi wartawan pelopor yang radikal, di mana sejumlah anggotanya sering diadili dan bahkan ada yang diasingkan oleh penguasa kolonial Belanda, (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013).

Setelah IJB, sejumlah tokoh pers pun mendirikan Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) pada 23-24 Desember 1933 di Surakarta dengan azas perjuangan: “menegakkan kedoedoekan pers Indonesia sebagai terompet perjoengan.” Di antara tokoh-tokoh dan anggota PERDI tercatat nama-nama W.R. Supratman (pencipta lagu Indonesia Raya), Mohammad Yamin, A.M. Sipahutar, Sumanang dan Adam Malik. Sipahutar dan Adam Malik adalah pendiri kantor berita nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.

Kantor berita Antara pun berperan pada masa pergerakan waktu itu yakni dengan penyiaran berita-berita menyokong pergerakan nasional mencapai

Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pihak penjajah tidak jarang melancarkan penggerebekan terhadap kantor-kantor Antara dan menjebloskan wartawan-wartawannya ke dalam penjara. Berdirinya PERDI dengan azas perjuangannya tersebut menunjukkan bahwa wartawan Indonesia tidak mundur terhadap usaha pengekangan oleh pihak penjajah, (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013).

Terbentuknya PWI pada 9 Februari 1946 tidak diikuti dengan perumusan formal Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI). Hal tersebut menurut R. H. Siregar dalam bukunya yang berjudul *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers* (2005: 1-2) yakni, "...karena yang menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh pers yang berkumpul di Surakarta ketika itu adalah bagaimana menghimpun serta mengintergrasikan segenap potensi bangsa khususnya masyarakat pers Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945."

Kode etik jurnalistik baru dirumuskan pada Kongres PWI di Malang tahun 1946 dan kemudian disahkan pada Kongres PWI di Surabaya tahun 1950. Prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tersebut menjadi landasan penilaian pemberitaan pers, (Siregar, 2005:3).

Akibat tekanan dari kolonial Belanda, sejumlah organisasi wartawan yang pernah terbentuk pada masa kemerdekaan tidak berumur panjang. Kemudian pada tahun 1984 di mana masa-masa pemerintahan yang dikatator, melalui Peraturan Menteri Penerangan Harmoko (Penmenpen) No. 2/1984, PWI dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi wartawan, atau wadah tunggal, yang boleh hidup di Indonesia. (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013).

## B. Lambang PWI dan Maknanya

### a. Lambang PWI

Adapun gambar lambang atau logo PWI adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. Lambang PWI**

Sumber: (<http://www.antaraneews.com>, diakses pada 30 Agustus 2013)

### b. Makna Lambang PWI

Adapun penjelasan makna dari lambang PWI adalah sebagai berikut,

(<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013):

- 1) Dasar bentuk (warna hitam): segi lima – melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idil ialah Pancasila.
- 2) Dasar bentuk bagian luar (warna biru): rangkaian kapas dan padi melambangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang diperjuangkan oleh organisasi.
- 3) Dasar bentuk bagian dalam
  - a. lidah api semangat (merah)
  - b. pena mas (kuning mas)
  - c. lensa kristal (hitam/putih)
  - d. inisial PWI (putih)
    - i. diwujudkan dalam bentuk pohon beringin, yang melambangkan pengayoman bagi kehidupan pers umumnya dan karyawan pers khususnya.
    - ii. huruf lingkaran Persatuan Wartawan ditempatkan di atas, sebagai atap pelindung. Huruf lingkaran Indonesia ditempatkan dibagian bawah, sebagai tempat berpijak, dimana PWI berada.
- 4) Jumlah bulir kapas – 17 buah, jumlah lidah api – 8 buah, jumlah bulir padi 45 buah, yang melambangkan pegangan teguh pada angka-angka proklamasi 17-8-1945.
- 5) Warna-warna
  - a. merah, hitam, kuning, putih, biru diambil dari warna-warna yang dianggap mewakili nafsu baik dan buruk manusia. Merah – amarah, hitam – angkara murka, kuning – sufiah, putih – mutmainah, biru – mulhinah.

- b. warna dasar lambang – biru: melambangkan angkasa yang tak terukur, yang juga melambangkan ilmu pengetahuan terus tak berhenti ke rohaniah yang dalam tak terukur.
- c. warna bulir padi – kapas, huruf lingkaran – kuning, melambangkan usaha yang tak pernah diam dalam mencapai hasil-hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi anggota, bangsa dan negara.
- d. warna dasar inisial – hitam, melambangkan ketulusan, kejujuran, kewajaran dan apa adanya.
- e. warna lidah api semangat – merah, bisa juga berarti api (cahaya) yang tak kunjung padam, yang memberi cahaya penerang dalam kegelapan, bisa juga berarti semangat yang tak pernah mendingin, keuletan, tahan uji, kegairahan kerja, tak lekas putus asa.
- f. bagian kapas dan huruf PWI – putih, melambangkan kesucian, kematangan, kekesatriaan, pantang mundur bilamana tekad baik sudah mulai diperjuangkan setia pada sumpahnya.

Lambang PWI dijelaskan dalam Sidang Gabungan Pengurus Pusat dan Badan Pekerja Kongres PWI di Makassar pada 11-13 November 1968, (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013).

### **C. Tujuan PWI**

Tujuan PWI dijelaskan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/ART) serta Kode Etik Jurnalistik yang merupakan hasil dari Kongres PWI XXII yang dilangsungkan di Jayapura, Papua pada 4-10 Juli 2007. Adapun tujuan PWI tertuang dalam PD/ART serta Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 4, yang isinya berbunyi (<http://www.pwi.or.id>, diakses pada 30 Agustus 2013):

1. Tercapainya cita-cita Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Terwujudnya kehidupan Pers Nasional yang merdeka, profesional, bermartabat, dan beradab.
3. Terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat.

4. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

#### **D. Keanggotaan PWI**

Dalam penerimaan anggota, PWI melakukan seleksi ketat. Pertama harus melampirkan surat pengangkatan menjadi wartawan dari perusahaan pers bersangkutan serta surat pernyataan bermaterai berisikan janji untuk menaati KEJ-PWI dalam formulir permohonan menjadi anggota. Bagi wartawan *freelance* harus melampirkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya dua Pemimpin Redaksi atau Penanggungjawab pemberitaan media. Selain syarat-syarat tersebut, PWI juga melakukan ujian bagi calon anggota sebelum orang yang bersangkutan diterima menjadi anggota PWI. Ujian yang dimaksud terutama mengenai KEJ-PWI sehingga tidak ada wartawan yang sama sekali tidak pernah membaca kode etik jurnalistik, (Siregar, 2005:15).

Menurut Siregar (2005:15), “Kebijakan penerimaan anggota seperti ini, selain akan mengangkat dan mempertahankan kredibilitas organisasi, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang bersangkutan karena secara formal diakui menjalankan profesi kewartawanannya.”

Walaupun merupakan organisasi pers yang besar, PWI ternyata tak luput dari sorotan. Hal tersebut terkait anggota-anggotanya yang acap kali tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Seperti yang diungkapkan Ashadi Siregar mengenai fenomena wartawan amplop, yakni wartawan yang datang berombongan dan menunggu pembagian angpao alias amplop di mana kelompok

wartawan ini biasanya berasal dari media yang dianggap tidak jelas perusahaan persnya, namun kelompok ini tidak semata-mata wartawan tanpa surat kabar. Bahkan banyak di antaranya memiliki kartu pers yang diterbitkan Persatuan Wartawan Indonesia, (2006:152-153).

Dengan pengamatan empiris tersebut, ada baiknya jika PWI kembali mengawasi anggota-anggotanya. Seleksi berkala terhadap anggota PWI mungkin dapat bermanfaat bagi organisasi dan juga untuk para pelaku media. Jangan sampai ujian kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh PWI hanya merupakan teori belaka dan hanya sebagai syarat bergabung dalam organisasi serta tidak benar-benar dijalani oleh anggota-anggotanya.

Fenomena wartawan amplop sering kali dianggap wajar oleh para pelaku media, terutama bagi yang memiliki pemasukan kecil dari media tempat mereka bekerja. Sebagai organisasi pers, PWI perlu menjamin kesejahteraan anggotanya. Agar wartawan tidak lagi menerima ‘amplop’ dari narasumber, PWI perlu memperjuangkan peningkatan penghasilan anggota-anggotanya kepada media tempat mereka berkerja. Saat kesejahteraan cukup maka wartawan tidak perlu mencari ‘sampingan’.

Kembali mengenai keanggotaan dalam PWI, hal tersebut dipaparkan dalam PD/ART PWI. Penjelasan mengenai keanggotaan dan aturannya ada dalam Bab III pasal 6-11, isinya adalah sebagai berikut (<http://www.pwi.or.id/index.php/pd-pri>, diakses pada 29 Mei 2013):

### BAB III KEANGGOTAAN

#### **Pasal 6**

PWI beranggotakan Wartawan Indonesia, yang melaksanakan profesi kewartawanan.

### **Pasal 7**

Keanggotaan PWI terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Muda;
- c. Anggota Luar Biasa;
- d. Anggota Kehormatan;

### **Pasal 8**

- (1) Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harus memenuhi persyaratan:
  - a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun;
  - b. Melakukan profesi kewartawanan secara aktif;
  - c. Lulus ujian peningkatan status keanggotaan yang diselenggarakan oleh Pengurus PWI.
- (2) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda, adalah:
  - a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
  - c. Berijazah serendah-rendahnya SMU (Sekolah Menengah Umum) atau yang sederajat sebelum tahun 2008 dan serendah-rendahnya DIII sesudah tahun 2008.
  - d. Telah diangkat menjadi wartawan oleh media tempat yang bersangkutan bekerja.
  - e. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.
- (3) Anggota Biasa yang tidak aktif lagi melakukan kegiatan kewartawanan dapat menjadi Anggota Luar Biasa.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan PWI seseorang (Warga Negara Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkembangan Pers Nasional, khususnya PWI.

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Anggota PWI berkewajiban:
  - a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, serta keputusan-keputusan organisasi;
  - b. Menjaga kredibilitas dan integritas wartawan dan PWI.
- (2) Menaati Kode Etik Jurnalistik.
- (3) Membayar uang iuran.

### **Pasal 10**

Anggota PWI dilarang merangkap keanggotaan organisasi kewartawanan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Anggota Biasa berhak:
  - a. Menghadiri Konferensi Cabang/Perwakilan dan Konferensi Kerja Cabang/Perwakilan;
  - b. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usul dan saran;
  - c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus jika memenuhi persyaratan;
  - d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara;
- (2) Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi Cabang/Perwakilan, dan Konferensi Kerja Cabang/Perwakilan, serta dapat mengemukakan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
- (3) Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawannya.

Berdasarkan keterangan dalam website PWI, jumlah anggota PWI seluruhnya adalah 14.348 orang. Keseluruhan jumlah anggota tersebut dari 31



cabang PWI yang ada di Indonesia, (<http://www.pwi.or.id/index.php/pd-prt>, diakses pada 4 September 2013). Jumlah itu termasuk PWI cabang Yogyakarta yang saat ini memiliki status keanggotaan aktif sebanyak 317 wartawan, (hasil wawancara dengan Sekretaris PWI cabang Yogyakarta, Bapak Primaswolo Sudjono pada 21 Januari 2013).

### **E. Struktur Organisasi PWI**

Berdasarkan keputusan Kongres XXII PWI yang ditetapkan di Banda Aceh pada 29 Juli 2008 dan disempurnakan berdasarkan Hasil Rapat Pleno PP PWI pada 4&14 Agustus 2008, Pengurus PWI Pusat periode 2008-2013 adalah sebagai berikut, (<http://www.pwi.or.id/index.php/pd-prt>, diakses pada 4 September 2013):

#### **PENASIHAT**

H. Sofjan Lubis (Ketua) (Pos Kota)  
Syafiq Umar (Pikiran Rakyat)  
Tribuana Said (Waspada)  
Syamsul Kahar (Serambi Indonesia)  
M. Alwi Hamu (Fajar)  
Rahman Arge (Pos Makassar)  
M.Soleh Tamrin (Sriwijaya Pos)  
Teddy Kharsadi (Cek & Ricek)  
Sabam Siagian (Suara Pembaruan)  
Syamsudin Ch Haesy (Jurnal Nasional)

#### **PENGURUS HARIAN**

Ketua Umum	: Margiono (Jawa Pos)
Ketua Bidang Organisasi	: Sasongko Tedjo (Suara Merdeka)
Ketua Bidang Pembinaan Daerah	: Atal S Depari (Tabloid Spirit)
Ketua Bidang Advokasi Wartawan	: Torro Mendrofa (Media Bangsa)
Ketua Bidang Pendidikan	: Marah Sakti Siregar (Cek & Ricek)
Ketua Bidang Litbang	: Widodo Asmowiyoto (Pikiran Rakyat)
Ketua Bidang Kesejahteraan	: HB Soeharto Wijaya (Pos Kota Group)
Ketua Bidang Luar Negeri	: August Parengkuan (Kompas)
Ketua Bidang Media Cetak	: Ikhwanul Kiram Mashuri (Republika)
Ketua Bidang Media Televisi	: Sugeng Suparwoto (Metro TV/Media Grup)
Ketua Bidang Radio	: Djoko Saksono (Majalah Telstra)
Ketua Bidang Multimedia	: Priyambodo RH (Kantor Berita Antara)
Sekretaris Jenderal	: Hendry Ch Bangun (Warta Kota)
Wakil Sekerretaris Jenderal	: Mirza Zulhadi (Pikiran Rakyat)
Wakil Sekerretaris Jenderal	: Rita Sri Hastuti (Majalah MaestroNews)
Bendahara Umum	: Budi R Hakim (Rakyat Merdeka)

Wakil Bendahara Umum : Randloph Latumahina (Investor Daaily)  
Wakil Bendahara Umum : Jennifer C Mandagie (Cosmopolitan Group)

#### **DEPARTEMEN-DEPARTEMEN**

Ketua Dep. Wartawan Politik & Pemerintahan : Sururi Alfaruq  
(Seputar Indonesia)  
Ketua Dep. Wartawan Hukum Dan HAM : Marthen Slamet Susanto  
(Koran Jakarta)  
Ketua Dep. Wartawan Ekonomi & Bisnis : Sjarifuddin (Sinar Harapan)  
Ketua Dep. Wartawan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) : Usman Yatim (Madina)  
Ketua Dep. Wartawan Pertahanan Dan Militer : Yapto Subiyakto (Warta Kota)  
Ketua Dep. Wartawan Kepolisian : Upa Labuhari  
(Tabloid Rambu Kota)  
Ketua Dep. Wartawan Infotainment : Farid R Iskandar (Cek & Ricek)  
Ketua Dep. Wartawan Film, Kebudayaan & Pariwisata : Yusuf Susilo Hartono (Visual Art)  
Ketua Dep. Wartawan Olahraga : Raja Parlindungan Pane  
(Tabloid Pemberantasan Korupsi)  
Ketua Dep. Wartawan Karikatur : R.Gatot Eko Cahyono  
(Suara Pembaharuan)  
Ketua Dep. Wartawan Foto : Saptono  
(Kantor Berita Foto Antara)

#### **DIREKTUR PROGRAM**

Dirut Prog Hub.Antar Media&Editor In Chief Forum : Putra Nababan (RCTI)  
Dirut Prog.Kajian Media dan Isu-isu Publik : Nasihin M (Republika)  
Dirut Prog.Media Enterpreneur&Pengelolaan Unit Usaha PWI : Muchlis Hasyim  
(Media Group)  
Dirut Riset Informasi/Data dan Publikasi : Daru Priambodo  
(Tempo)  
Dirut Prog Hub dan Kerjasama Luar Negeri : Ramadhan Pohan  
(Jurnal Nasional)  
Dirut Prog.Winning Award Karya Jurnalistik : Rahman A Mangunsara  
(SCTV)  
Dirut Prog.Winning Award Prestasi Publik : Gatot T (Trans TV)  
Dirut Prog.Buku Sejarah PWI : Widi Yarmanto  
(Majalah Saudagar)

#### **DEWAN KEHORMATAN**

Ketua Merangkap Anggota : Drs Tarman Azam (Harian Terbit)  
Sekretaris Merangkap Anggota : H. Ilham Bintang (Cek & Ricek)  
Anggota : Ishadi SK (Trans TV)  
Asro Kamal Rokan (Kantor Berita Antara)  
Rusdy Effendi (Banjarmasin Post)  
Irawati Nasution (Kriya Indonesian Craft)  
Wikrama I Abidin (Media Notariat)  
M. Noeh Hatumahena ( Kantor Berita Antara)

#### **KONFEDERASI WARTAWAN ASEAN (CAJ)**

Sekretaris Tetap : Syaiful Hadi (Kantor Berita Antara)  
Wakil Sekretaris Tetap : Fardah Assegaf (Kantor Antara)  
Direktur : Bob Iskandar (Q TV)  
Direktur : Astrid B. Suryo (Neraca)

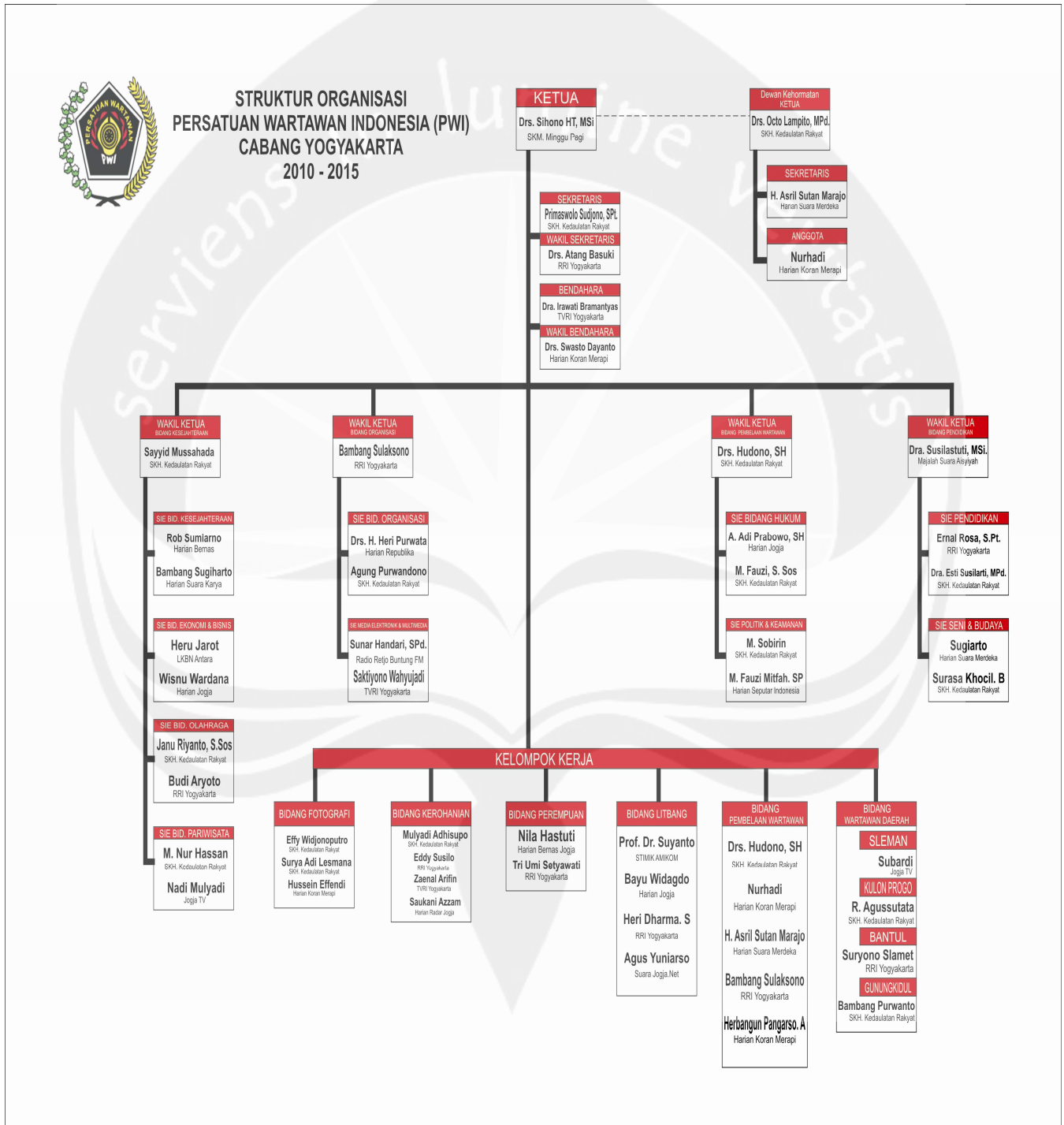
#### **SIWO Pusat**

Ketua : Raja Parlindungan Pane (Tabloid Pemberantasan Korupsi)  
**Kepala Sekretariat PWI Pusat/Direktur Administrasi Umum** : Karim Papatungan

Sementara pengurus PWI cabang Yogyakarta dengan periode 2010-2015

adalah sebagai berikut:

Sumber: Kantor PWI Cabang Yogyakarta



Gambar 3. Struktur Pengurus PWI Cabang Yogyakarta